

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Mei 2024 Uang Penerima KJMU cair

### Palmerah, Warta Kota

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pada 7 Maret 2024 sistem pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak dihoid.

Heru pun sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI, Purwosusilo dan menyatakan berjalan normal.

"Mahasiswa yang mendapatkan KJMU saya pastikan bisa mendapatkan KJMU sebagaimana mestinya," kata Heru, Senin (18/3/2023).

Meski begitu, kata Heru pihaknya tetap melakukan pendataan by name by adress dengan mendatangi dan mengecek langsung ke lapangan.

Heru mengaku, anggaran KJMU ini baru akan tersedia pada bulan Mei mendatang dan tahap keduanya di bulan November 2024.

"Nah ini ada APBD-P. Anggaran nggak masalah. Yang jelas, kami akan melakukan pemadanan data. Termasuk juga tadi dengan Pak Dirut PAM, kami pemadanan data dengan PAM. Karena PAM punya klasifikasi rumah tidak mampu, rumah setengah mampu, rumah mampu, itu akan kita padankan di sana," imbuhnya.

Sementara itu ratusan mahasiswa mengajukan keberatan atas pencoretan dari daftar penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo mengungkapkan, sebanyak 294 melakukan penyanggahan atas pemadanan data yang dilakukan Pemprov DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI menemukan 624 dari 19.041 mahasiswa yang tercatat sebagai penerima KJMU tidak memenuhi syarat.



Doc: Pemprov DKI

"Sejauh ini kami cek data 325 orang (yang tidak memenuhi syarat), sedangkan yang 299 orang akan dilakukan pengecekan lanjutan," ucap Purwosusilo seperti dilansir dari TribunJakarta.com, Minggu (17/3/2024).

"Dari 325 orang yang sudah dicek, sebanyak 294 orang tidak mengakui atau menyanggah," ucap Purwosusilo melanjutkan.

Sebaliknya, kata Purwosusilo, ada 31 orang yang mengakui ketidaktepatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta.

Mereka dicoret lantaran terdeteksi sudah tidak tinggal di Jakarta lagi dan ada juga mahasiswa yang berasal dari keluarga PNS, pegawai BUMN, hingga TNI/Polri.

Diminta lengkapi dokumen Tertiadap ratusan mahasiswa yang mengajukan keberatan tersebut, Disdik DKI memberi kesempatan kepada mereka hingga Senin (18/3/2024) untuk melengkapi dokumen sanggahan.

"Kami sudah memanggil mahasiswa tersebut. Setelah itu akan divalidasi, verifikasi kembali, dan akan survei ke lapangan untuk mengecek kebenarannya," ujar Purwosusilo.

Selain mengacu pada data dari Disdukcapil, Disdik DKI juga melakukan pengecekan di kampus tempat para penerima KJMU itu berkuliah.

Hasilnya, ada tambahan 130 mahasiswa yang dicoret dari daftar penerima KJMU lantaran sudah lulus kuliah dan ada yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tak memenuhi standar. (m26/Kompas.com)